

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan ekonomi di suatu Negara tentunya tidak bisa terlepas dari keikutsertaan seluruh komponen masyarakat, tidak terkecuali keikutsertaan peranan Perempuan didalamnya. Populasi perempuan di Indonesia yang kini hampir mencapai setengah dari proporsi penduduk Indonesia secara keseluruhan menurut jenis kelamin laki-laki sebesar 140,79 juta sedangkan Perempuan sebesar 137,91 juta dengan rasio laki-laki 102,1 : 100 terhadap perempuan (Badan Pusat Statistik 2023) memberikan peranan penting bagi kaum perempuan untuk kegiatan ekonomi yang selama abad ke-24 ini juga memasukkan jutaan kaum perempuan ke dalam angkatan kerja. Hasil pembangunan yang telah di capai suatu Negara antara lain dapat dilihat dari peningkatan peran perempuan dilingkungan masyarakat, khususnya dalam kegiatan ekonomi. Bila sebelumnya perempuan hanya berperan sebagai pengurus rumah tangga, sedangkan laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah utama di dalam keluarga, maka saat ini semakin banyak perempuan yang masuk kedalam pasar tenaga kerja. Namun partisipasi perempuan dalam dunia angkatan kerja masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan jumlah wanita secara keseluruhan yang menandakan bahwa sumber daya manusia masih belum dimanfaatkan dengan baik. Jika kesetaraan gender antara pekerja perempuan dengan laki-laki dapat lebih dikembangkan, maka pembangunan ekonomi suatu Negara dapat meningkat dengan memberikan lebih banyak kesejahteraan untuk penduduknya.

Selama ini perempuan seringkali didiskreditkan peranannya baik dalam rumah tangga, bermasyarakat, maupun dalam kehidupan bernegara. Perempuan selalu dikaitkan dengan mengurus rumah tangga, anak, dan suami. Perbedaan fisik dan psikis antara laki-laki dan perempuan menimbulkan perbedaan fungsi antara keduanya. Perempuan memiliki fungsi keibuan sebab ia melahirkan anak, sehingga menimbulkan konsekuensi untuk merawat, mengasuh, menyusui, dan memberikan kasih sayang. Sementara itu laki-laki berfungsi sebagai pencari

nafkah dikarenakan mempunyai kondisi fisik yang kuat. Pembagian fungsi tersebut pada akhirnya menumbuhkan pembagian kerja secara generalisasi. Yang paling menonjol adalah ditempatkan perempuan dalam pekerjaan domestic dan ia bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangga. Sedangkan laki-laki ditempatkan pada ranah publik sebagai pencari nafkah utama. Peran perempuan sebagai ibu menjadikan kerja yang dilakukannya tidak tampak dan tidak direkam secara statistik (Wara,2016).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK) adalah indikator penting yang mencerminkan seberapa banyak Perempuan dalam usia kerja yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, baik secara formal maupun informal. Keterlibatan perempuan yang mayoritas dalam pekerjaan domestik dapat dilihat melalui Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan. *International Labour Organization* (ILO) merumuskan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) atau *Labour Force Participation Rate* (LFPR) adalah ukuran proporsi penduduk usia kerja suatu Negara yang bergerak aktif di pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan terhadap populasi penduduk usia kerja. TPAK menghitung jumlah orang dalam angkatan kerja sebagai persentase dari penduduk usia kerja. Angkatan kerja adalah jumlah dari orang yang bekerja dan tidak bekerja, sedangkan populasi penduduk usia kerja adalah penduduk di atas usia kerja legal (biasanya 15 tahun ke atas) (ILO,2016).

Sebagai sebuah negara yang sedang berkembang, Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2023, jumlah penduduk Indonesia adalah sebanyak 278.696,2 jiwa, dimana 140.786,6 jiwa adalah laki-laki dan 137.909,4 jiwa adalah perempuan, dengan populasi wanita sebanyak 49 persen dari total penduduk. Data tersebut menunjukkan bahwa potensi sumber daya manusia di Indonesia sangat besar untuk dimanfaatkan sebagai tenaga kerja guna meningkatkan pembangunan ekonomi, tak terkecuali kaum perempuan di Indonesia jika dimanfaatkan dan dikembangkan dengan baik.

Di Provinsi Jambi, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan sebagai ukuran untuk menunjukkan keikutsertaan perempuan di dalam dunia ketenagakerjaan, keikutsertaan perempuan dalam dunia ketenagakerjaan ini,

tidak hanya bertujuan untuk membantu memenuhi perekonomian rumah tangga dan memperbaiki tingkat kesejahteraannya, tetapi juga untuk mencapai kepuasan individu, Badan Pusat Statistik (2022). Berbagai kecenderungan wanita selama beberapa tahun terakhir ini, dilihat dengan makin meningkatnya angka partisipasi angkatan kerja wanita, yang didominasi oleh mereka yang berusia relatif muda. Untuk dapat mengetahui TPAK Perempuan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2019-2023 (persen)**

Kabupaten/Kota	Tahun					Rata-Rata
	2019	2020	2021	2022	2023	
Kerinci	50,00	56,48	58,06	61,42	60,88	57,37
Merangin	51,25	51,96	52,06	50,98	54,44	52,14
Sarolangun	44,75	51,14	46,33	47,77	47,14	47,43
Batang Hari	38,07	47,82	51,68	42,44	38,16	43,63
Muaro Jambi	34,29	37,41	40,77	45,55	58,79	43,36
Tanjab Timur	50,91	60,48	55,40	54,50	47,21	53,70
Tanjab Barat	53,20	59,46	59,00	50,86	51,06	54,72
Tebo	51,77	52,55	52,63	49,14	50,28	51,27
Bungo	44,69	45,12	44,06	48,87	53,52	47,25
Kota Jambi	50,72	48,49	47,68	45,88	51,57	48,87
Kota Sungai Penuh	50,37	50,93	52,29	47,11	53,69	50,88
<b>Provinsi Jambi</b>	<b>47,03</b>	<b>50,04</b>	<b>49,89</b>	<b>48,97</b>	<b>51,68</b>	<b>49,52</b>

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2024*

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa TPAK Perempuan di Provinsi Jambi pada tahun 2019 adalah 47.03 persen, kemudian pada tahun 2020 naik sebesar 50.04 persen, dan pada tahun 2021 TPAK perempuan menurun menjadi 49.89 persen, lalu pada tahun 2022 TPAK perempuan kembali menurun menjadi 48.97 persen, namun pada tahun 2023 TPAK perempuan mulai meningkat sebesar 51.68 persen dengan rata-rata Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

perempuan selama 5 tahun terakhir ini yaitu sebesar 49,52 persen. Selanjutnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi cenderung mengalami naik turun atau berfluktuasi pada setiap tahunnya, namun dapat dilihat TPAK perempuan tertinggi tercatat pada Kabupaten Kerinci yaitu sebesar 57,37 persen, dan TPAK perempuan terendah tercatat pada Kabupaten Muaro Jambi yaitu sebesar 43,63 persen. Selain Kabupaten Muaro Jambi tersebut, seluruh wilayah di Provinsi Jambi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan masih rendah itu diduga karena pengaruh dari Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Perkapita dan Ketimpangan Pendapatan.

Salah satu pengaruh TPAK perempuan dapat dilihat juga dari kualitas sumber daya manusianya dan tingkat pendidikannya yang di tuangkan dalam angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks pembangunan manusia sendiri merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya untuk membangun kualitas hidup manusia. Pembangunan merupakan sebuah proses untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik (Beati,2013).

**Tabel 1.2 Indeks Pembangunan Manusia, Pengeluaran Perkapita, Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jambi Tahun 2019-2023**

Tahun	Provinsi Jambi			
	Indeks Pembangunan Manusia %	Pengeluaran Perkapita Rp	Pertumbuhan Ekonomi %	Ketimpangan Pendapatan
2019	71,26	882,667	4,35	0,32
2020	71,29	866,000	-0,51	0,32
2021	71,63	882,333	3,70	0,31
2022	72,14	905,917	5,12	0,33
2023	72,77	930,000	4,66	0,34

*Sumber : Badan Pusat statistik Provinsi Jambi, 2024*

Pada tabel 1.2 dapat dilihat di Provinsi Jambi Indeks Pembangunan Manusia pada 5 tahun terakhir dari tahun 2019- 2023 berfluktuasi dan cenderung mengalami tren naik, pada tahun pada tahun 2019 sebesar 71,26 persen, pada tahun 2020 terus mengalami kenaikan yaitu sebesar 71,29 persen. Kemudian pada tahun 2021 kembali mengalami kenaikan menjadi 71,63 persen, lalu pada tahun 2022 mengalami kenaikan lagi menjadi sebesar 72.14 persen, hingga tahun 2020 Indeks Pembangunan Manusia terus mengalami peningkatan menjadi sebesar 72,77 persen. Tolak ukur pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari kemampuannya menghasilkan barang dan jasa. Salah satunya dapat dilihat dari pendapatan nasionalnya.

Kenaikan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan sebagian disebabkan juga oleh bertambahnya kebutuhan hidup. Seperti yang sudah dikaji banyak ahli, dilingkungan keluarga semakin mereka dihimpit kemiskinan, semakin berat tekanan yang mengharuskan mereka mencari pekerjaan yang produktif sekalipun dengan imbalan yang rendah karena untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Jadi apabila TPAK semakin tinggi, maka tingkat kemiskinan akan menurun (Novriansyah,2018).

Semakin tinggi akan kebutuhan utama dan meningkatnya pengeluaran dalam kehidupan semakin mendorong masyarakat untuk bekerja dan mendapatkan imbalan dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Ketika Pengeluaran perkapita meningkat, Perempuan sering kali memiliki kesempatan untuk berinvestasi dalam Pendidikan dan keterampilan. Investasi ini memungkinkan mereka untuk meningkatkan daya saing di pasar kerja, yang pada gilirannya meningkatkan partisipasi Perempuan dalam Angkatan kerja (Esther Duflo, 2019).

Dalam Provinsi Jambi tingkat pengeluaran perkapita dari tahun 2019 hingga 2023 mengalami fluktuasi, pada tahun 2019 pengeluaran perkapita masyarakat di Provinsi Jambi adalah sebesar Rp882.667 perbulan, pada tahun 2020 pengeluaran perkapita menurun menjadi Rp866.000 perbulan, pada tahun 2021 pengeluaran perkapita masyarakat di Provinsi Jambi meningkat menjadi Rp 882.333 perbulan dan pada tahun 2022 pengeluaran perkapita masyarakat di Provinsi Jambi mengalami peningkatan menjadi Rp 95.917 perbulan dan pada

tahun 2023 pengeluaran perkapita meningkat menjadi sebesar Rp 930.000 perbulan. Hal ini menunjukkan pengeluaran perkapita masyarakat di Provinsi Jambi cenderung meningkat pada setiap tahunnya.

Pertumbuhan dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan saling terkait erat dalam banyak aspek. Ketika ekonomi tumbuh, peluang kerja, akses ke Pendidikan, serta kebijakan yang mendukung kesetaraan gender cenderung meningkat yang pada gilirannya dapat meningkatkan Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan. Di Provinsi Jambi pertumbuhan ekonomi 5 tahun terakhir yaitu pada tahun 2019 sampai 2023 mengalami fluktuatif. pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi sebesar 4,35 persen, kemudian pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yang drastis akibat pandemik covid 19 yaitu sebesar -0,51 persen, Namun pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi stabil dan kembali meningkat sebesar 3,70 persen, pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi terus membaik dengan laju pertumbuhan sebesar 5.12 persen dan pada tahun 2023 mengalami sedikit penurunan menjadi 4.66 persen.

Selanjutnya, perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan kerja dapat dilihat dari indikator tingkat pendidikan yang ditamatkan, karena pada umumnya seseorang yang mempunyai pendidikan yang lebih tinggi akan mempunyai produktivitas kerja yang lebih baik. Semakin lama seorang wanita menempuh pendidikan atau semakin tinggi tingkat pendidikannya maka kecenderungan untuk berpartisipasi dalam pasar kerja juga akan meningkat (Abraham & Ohemeng 2017).

Selanjutnya ketimpangan pendapatan juga menjadi pengaruh terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dimana ketimpangan pendapatan adalah suatu kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Ketimpangan ditentukan oleh tingkat pembangunan, heterogenitas etnis, ketimpangan juga berkaitan dengan kediktatoran dan pemerintah yang gagal menghargai property rights. Ketimpangan pendapatan secara umum terjadi karena keadaan geografis dan fluktuasi pada sektor sumberdaya manusia dan ketenagakerjaannya. (Kuhn dan Ravazzini, 2017)

Ketimpangan pendapatan diukur dengan *Gini Concentration Ratio* (GRC)

atau lazim disebut dengan *Gini Ratio*. Dapat dilihat gini ratio di provinsi jambi pada tahun 2019-2023. Pada tahun 2019 Gini Ratio sebesar 0,32 persen, selanjutnya pada tahun 2020 menetap pada angka 0,32 persen, dan pada tahun 2021 gini ratio Provinsi Jambi menurun kembali menjadi 0,31 persen, kemudian pada tahun 2022 0,33 persen dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,34 persen.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengeluaran perkapita, pertumbuhan ekonomi, dan ketimpangan pendapatan memiliki pengaruh terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan. Peningkatan IPM, terutama melalui pendidikan dan kesehatan, serta pengeluaran perkapita yang lebih tinggi, mendorong lebih banyak perempuan untuk terlibat dalam angkatan kerja. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif juga memperluas peluang kerja bagi perempuan. Namun, ketimpangan pendapatan yang tinggi dapat menjadi penghalang, baik dengan membatasi akses perempuan pada pekerjaan yang layak maupun menciptakan kebutuhan bagi perempuan berpenghasilan rendah untuk bekerja demi mendukung keluarga. Oleh karena itu, kebijakan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi, serta pengurangan ketimpangan, akan berperan penting dalam meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan di atas peneliti bermaksud membuat penelitian dengan judul **“Determinan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

TPAK Perempuan menjadi masalah yang belum dapat diselesaikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Fenomena dalam penelitian ini yaitu berdasarkan data bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pengeluaran Perkapita, Pertumbuhan Ekonomi, dan Ketimpangan Pendapatan masih belum terlihat keterkaitannya terhadap TPAK Perempuan. Berdasarkan latar belakang yang telah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perkembangan TPAK perempuan, IPM, Pengeluaran Perkapita, Pertumbuhan Ekonomi, dan Ketimpangan Pendapatan di kabupaten/kota Provinsi Jambi Tahun 2019-2023?
2. Bagaimana pengaruh IPM, Pengeluaran Perkapita, Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan terhadap TPAK perempuan di kabupaten/kota Provinsi Jambi Tahun 2019-2023?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan TPAK perempuan, IPM, Pengeluaran Perkapita, Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan di kabupaten/kota Provinsi Jambi Tahun 2019-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh IPM, Pengeluaran Perkapita, Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan terhadap TPAK perempuan di kabupaten/kota Provinsi Jambi Tahun 2019-2023.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Secara Ilmiah, diharapkan dapat menambah sarana wawasan dan pengetahuan serta bermanfaat bagi penelitian berikutnya terutama yang berkaitan dengan Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi TPAK perempuan di kabupaten/kota Provinsi Jambi.
2. Secara Praktis, dapat dijadikan bahan masukan dan informasi bagi pemerintah dalam menentukan arah dan strategi pembangunan di masa mendatang serta sebagai bahan evaluasi bagi perencanaan dalam mengantisipasi kondisi ketenagakerjaan nasional.